



BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

ing 2

ing

ing

ing 3

ing

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 161);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**





## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
6. Satuan Pendidikan Formal selanjutnya disingkat SPF adalah Satuan Pendidikan SD dan Satuan Pendidikan SMP.
7. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
8. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional pada Satuan Pendidikan SD dan Satuan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
10. Kepala UPT SPF adalah Kepala UPT SPF SD dan Satuan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan profesi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SPF SD dan UPT SPF SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) UPT SPF SD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT SPF SMP sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT SPF SD dan UPT SPF SMP adalah merupakan UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) UPT SPF SD dan UPT SPF SMP dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT SPF SD terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT SPF SMP terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT SPF SD dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPF SD.
- (4) Kepala UPT SPF SMP dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPF SMP.
- (5) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Bagan Susunan Organisasi UPT SPF SD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bagan Susunan Organisasi UPT SPF SMP sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian kesatu Kepala

## Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal penyelenggaraan program pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPT SPF bersangkutan;
- b. Pelaksanaan program pendidikan formal SPF bersangkutan;
- c. Penetapan sasaran berdasarkan skala prioritas penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan;
- d. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pelaksanaan urusan pendidikan pada satuan pendidikan bersangkutan;
- e. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) pada satuan pendidikan bersangkutan;
- f. Penyusunan capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan bersangkutan;
- g. Pembinaan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan;
- h. Penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPT SPF bersangkutan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan UPT SPF bersangkutan;
- c. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi, kerumahtanggaan dan pelaporan pada SPF bersangkutan;
- d. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana SPF bersangkutan;
- e. Melaksanakan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan teknis dan administrasi pada SPF bersangkutan;
- f. Memfasilitasi pembinaan karir jabatan fungsional tertentu;



- g. Menyusun laporan kegiatan ketatausahaan UPT pada SPF bersangkutan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT.

### Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPT SPF berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu dan aparat pelaksana UPT SPF bersangkutan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT SPF bersangkutan.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang pendidikan dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT SPF bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPT SPF berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam



lingkungan UPT SPF bersangkutan maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPT SPF tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT SPF berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha untuk mewakilinya;

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

SEKERTARIS DAERAH	
KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG	
ADMINISTRASI UMUM	
KABAG HUKUM DAN HAM	
ASUBAG	

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 46 TAHUN 2017  
TAHUN : 15 Desember 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA.

---

UPT SPF SD PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. UPT SPF SD Sarudu 1;
2. UPT SPF SD Sarudu 2;
3. UPT SPF SD Sarudu 3;
4. UPT SPF SD Sarudu 4;
5. UPT SPF SD Sarudu 5;
6. UPT SPF SD Sarudu 6;
7. UPT SPF SD Sarudu 7;
8. UPT SPF SD Sarudu 8;
9. UPT SPF SD Sarudu 9;
10. UPT SPF SD Sarudu 10;
11. UPT SPF SD Dapurang 1;
12. UPT SPF SD Dapurang 2;
13. UPT SPF SD Dapurang 3;
14. UPT SPF SD Dapurang 4;
15. UPT SPF SD Dapurang 5;
16. UPT SPF SD Dapurang 6;
17. UPT SPF SD Dapurang 7;
18. UPT SPF SD Dapurang 8;
19. UPT SPF SD Dapurang 9;
20. UPT SPF SD Dapurang 10;
21. UPT SPF SD Dapurang 11;
22. UPT SPF SD Dapurang 12;
23. UPT SPF SD Dapurang 13;
24. UPT SPF SD Dapurang 14;
25. UPT SPF SD Duripoku 1;
26. UPT SPF SD Duripoku 2;
27. UPT SPF SD Duripoku 3;
28. UPT SPF SD Duripoku 4;
29. UPT SPF SD Duripoku 5;
30. UPT SPF SD Duripoku 6;
31. UPT SPF SD Baras 1;

32. UPT SPF SD Baras 2;
33. UPT SPF SD Baras 3;
34. UPT SPF SD Baras 4;
35. UPT SPF SD Baras 5;
36. UPT SPF SD Baras 6;
37. UPT SPF SD Baras 7;
38. UPT SPF SD Baras 8;
39. UPT SPF SD Baras 9;
40. UPT SPF SD Baras 10;
41. UPT SPF SD Baras 11;
42. UPT SPF SD Baras 12;
43. UPT SPF SD Baras 13;
44. UPT SPF SD Baras 14;
45. UPT SPF SD Baras 15;
46. UPT SPF SD Baras 16;
47. UPT SPF SD Baras 17;
48. UPT SPF SD Baras 18;
49. UPT SPF SD Baras 19;
50. UPT SPF SD Baras 20;
51. UPT SPF SD Baras 21;
52. UPT SPF SD Baras 22;
53. UPT SPF SD Bulu Taba 1;
54. UPT SPF SD Bulu Taba 2;
55. UPT SPF SD Bulu Taba 3;
56. UPT SPF SD Bulu Taba 4;
57. UPT SPF SD Bulu Taba 5;
58. UPT SPF SD Bulu Taba 6;
59. UPT SPF SD Bulu Taba 7;
60. UPT SPF SD Bulu Taba 8;
61. UPT SPF SD Bulu Taba 9;
62. UPT SPF SD Bulu Taba 10;
63. UPT SPF SD Bulu Taba 11;
64. UPT SPF SD Bulu Taba 12;
65. UPT SPF SD Lariang 1;
66. UPT SPF SD Lariang 2;
67. UPT SPF SD Lariang 3;
68. UPT SPF SD Lariang 4;
69. UPT SPF SD Lariang 5;



70. UPT SPF SD Lariang 6;
71. UPT SPF SD Lariang 7;
72. UPT SPF SD Lariang 8;
73. UPT SPF SD Lariang 9;
74. UPT SPF SD Pasangkayu 1;
75. UPT SPF SD Pasangkayu 2;
76. UPT SPF SD Pasangkayu 3;
77. UPT SPF SD Pasangkayu 4;
78. UPT SPF SD Pasangkayu 5;
79. UPT SPF SD Pasangkayu 6;
80. UPT SPF SD Pasangkayu 7;
81. UPT SPF SD Pasangkayu 8;
82. UPT SPF SD Pasangkayu 9;
83. UPT SPF SD Pasangkayu 10;
84. UPT SPF SD Pasangkayu 11;
85. UPT SPF SD Pasangkayu 12;
86. UPT SPF SD Pasangkayu 13;
87. UPT SPF SD Pasangkayu 14;
88. UPT SPF SD Pasangkayu 15;
89. UPT SPF SD Pasangkayu 16;
90. UPT SPF SD Pasangkayu 17;
91. UPT SPF SD Tikke Raya 1;
92. UPT SPF SD Tikke Raya 2;
93. UPT SPF SD Tikke Raya 3;
94. UPT SPF SD Tikke Raya 4;
95. UPT SPF SD Tikke Raya 5;
96. UPT SPF SD Tikke Raya 6;
97. UPT SPF SD Tikke Raya 7;
98. UPT SPF SD Tikke Raya 8;
99. UPT SPF SD Tikke Raya 9;
100. UPT SPF SD Tikke Raya 10;
101. UPT SPF SD Tikke Raya 11;
102. UPT SPF SD Tikke Raya 12;
103. UPT SPF SD Tikke Raya 13;
104. UPT SPF SD Tikke Raya 14;
105. UPT SPF SD Tikke Raya 15;
106. UPT SPF SD Tikke Raya 16;
107. UPT SPF SD Tikke Raya 17;

108. UPT SPF SD Tikke Raya 18;
109. UPT SPF SD Tikke Raya 19;
110. UPT SPF SD Tikke Raya 20;
111. UPT SPF SD Tikke Raya 21;
112. UPT SPF SD Pedongga 1;
113. UPT SPF SD Pedongga 2;
114. UPT SPF SD Pedongga 3;
115. UPT SPF SD Pedongga 4;
116. UPT SPF SD Pedongga 5;
117. UPT SPF SD Bambalamotu 1;
118. UPT SPF SD Bambalamotu 2;
119. UPT SPF SD Bambalamotu 3;
120. UPT SPF SD Bambalamotu 4;
121. UPT SPF SD Bambalamotu 5;
122. UPT SPF SD Bambalamotu 6;
123. UPT SPF SD Bambalamotu 7;
124. UPT SPF SD Bambalamotu 8;
125. UPT SPF SD Bambalamotu 9;
126. UPT SPF SD Bambalamotu 10;
127. UPT SPF SD Bambalamotu 11;
128. UPT SPF SD Bambalamotu 12;
129. UPT SPF SD Bambalamotu 13;
130. UPT SPF SD Bambalamotu 14;
131. UPT SPF SD Bambalamotu 15;
132. UPT SPF SD Bambalamotu 16;
133. UPT SPF SD Bambalamotu 17;
134. UPT SPF SD Bambalamotu 18;
135. UPT SPF SD Bambalamotu 19;
136. UPT SPF SD Bambalamotu 20;
137. UPT SPF SD Bambalamotu 21;
138. UPT SPF SD Bambaira 1;
139. UPT SPF SD Bambaira 2;
140. UPT SPF SD Bambaira 3;
141. UPT SPF SD Bambaira 4;
142. UPT SPF SD Bambaira 5;
143. UPT SPF SD Bambaira 6;
144. UPT SPF SD Bambaira 7;
145. UPT SPF SD Bambaira 8;

- 146. UPT SPF SD Bambaira 9;
- 147. UPT SPF SD Bambaira 10;
- 148. UPT SPF SD Bambaira 11;
- 149. UPT SPF SD Sarjo 1;
- 150. UPT SPF SD Sarjo 2;
- 151. UPT SPF SD Sarjo 3;
- 152. UPT SPF SD Sarjo 4;
- 153. UPT SPF SD Sarjo 5;
- 154. UPT SPF SD Sarjo 6;
- 155. UPT SPF SD Sarjo 7; dan
- 156. UPT SPF SD Sarjo 8.

ASISTENSI DAERAH	
ASISTENSI DAERAH	
ASISTENSI DAERAH	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KASUBAG	

BUPATI MAMUJU UTARA,  
H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 46 TAHUN 2017  
TAHUN : 15 Desember 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SPF PADA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

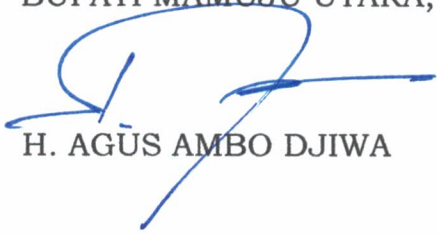
---

UPT SPF SMP PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. UPT SPF SMP Sarudu 1;
2. UPT SPF SMP Sarudu 2;
3. UPT SPF SMP Sarudu 3;
4. UPT SPF SMP Sarudu 4;
5. UPT SPF SMP Dapurang 1;
6. UPT SPF SMP Dapurang 2;
7. UPT SPF SMP Dapurang 3;
8. UPT SPF SMP Dapurang 4;
9. UPT SPF SMP Dapurang 5;
10. UPT SPF SMP Duripoku;
11. UPT SPF SMP Baras 1;
12. UPT SPF SMP Baras 2;
13. UPT SPF SMP Baras 3;
14. UPT SPF SMP Baras 4;
15. UPT SPF SMP Bulu Taba 1;
16. UPT SPF SMP Bulu Taba 2;
17. UPT SPF SMP Bulu Taba 3;
18. UPT SPF SMP Bulu Taba 4;
19. UPT SPF SMP Lariang 1;
20. UPT SPF SMP Lariang 2;
21. UPT SPF SMP Lariang 3;
22. UPT SPF SMP Pasangkayu 1;
23. UPT SPF SMP Pasangkayu 2;
24. UPT SPF SMP Pasangkayu 3;
25. UPT SPF SMP Pasangkayu 4;
26. UPT SPF SMP Tikke Raya 1;
27. UPT SPF SMP Tikke Raya 2;
28. UPT SPF SMP Pedongga;
29. UPT SPF SMP Bambalamotu 1;
30. UPT SPF SMP Bambalamotu 2;
31. UPT SPF SMP Bambalamotu 3;
32. UPT SPF SMP Bambalamotu 4;

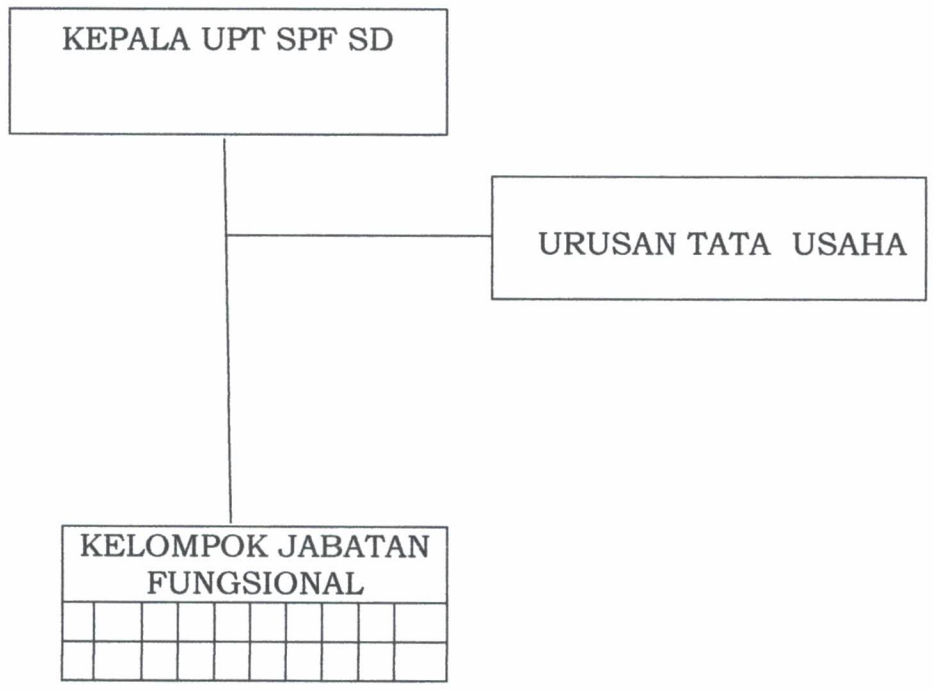
- 33. UPT SPF SMP Bambalamotu 5;
- 34. UPT SPF SMP Bambalamotu 6;
- 35. UPT SPF SMP Bambalamotu 7;
- 36. UPT SPF SMP Bambaira 1;
- 37. UPT SPF SMP Bambaira 2;
- 38. UPT SPF SMP Sarjo 1; dan
- 39. UPT Dinas SPF SMP Sarjo 2.

KEKANTORAN DAERAH	
KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG	
ADMINISTRASI	
KABAG HUKUM DAN HAK	
MASUBAG	

BUPATI MAMUJU UTARA,  
  
H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 46 TAHUN 2017  
 TAHUN : 15 Desember 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
 PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
 DAN OLAHRAGA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 UPT SPF SD PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



SEKERTARIS DAERAH	
KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN ENCIK	
ADMINISTRASI	
KABAG HUKUM DAN HAM	
ASUBAG	

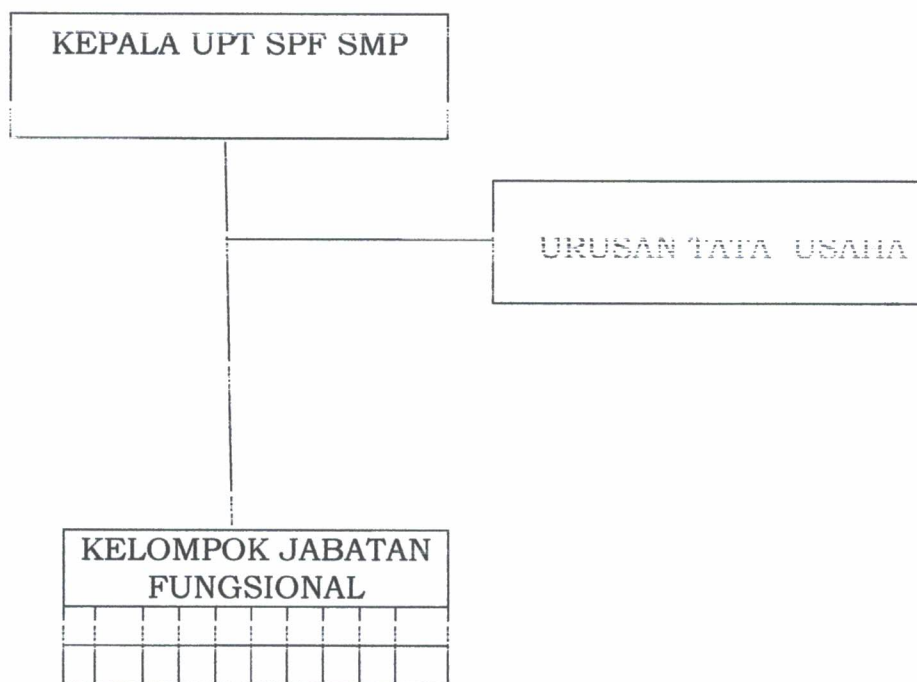
BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 46 TAHUN 2017  
TANGGAL : 15 Desember 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT SPF SMP PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



SEKERTARIS DAERAH	
KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG	
ADMINISTRASI	
KABAG HUKUM DAN HAM	
ASUBAG	

BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA

4511

4

4512